

Telaah Visi, Misi, dan Program Perempuan Calon Kepala Daerah



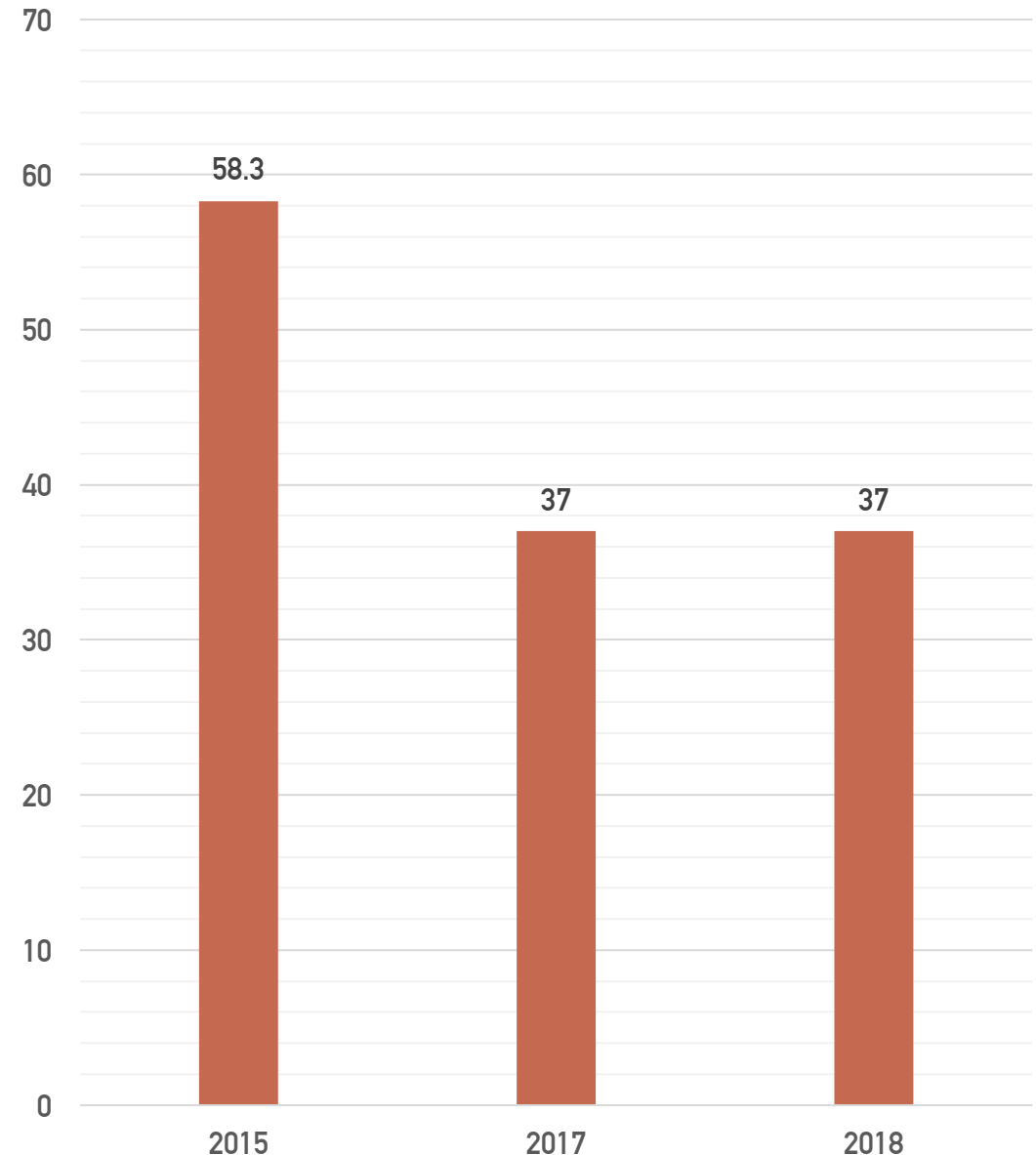


HANYA ADA 37 DARI
101 PEREMPUAN
CALON KEPALA
DAERAH (37
PERSEN) YANG
MENCANTUMKAN
VISI, MISI, DAN
PROGRAM YANG
MENYEMATKAN
KATA PEREMPUAN,
WANITA, ATAU IBU.

PERBANDINGAN DENGAN PILKADA 2015 DAN 2017

2015: Ada **7 dari 12** perempuan kepala daerah terpilih (**58,3 persen**) yang memiliki visi, misi, dan program yang berpihak pada perempuan.

2017: Hanya **17 dari 46** orang perempuan (**37 persen**) yang memiliki visi, misi, dan program yang berpihak pada perempuan.



VISI

Tidak ada satupun perempuan calon kepala daerah yang secara eksplisit mencantumkan kata perempuan, wanita, atau ibu dalam visinya.

Hanya ada **satu pasang calon kepala daerah** yang secara implisit mengusung konsep kesetaraan dalam visinya.

MISI

10 orang perempuan calon kepala daerah mempunyai misi yang menyematkan kata perempuan, wanita, atau ibu. Misi yang diusung berkisar pada:

1. Perlindungan Perempuan
2. Pemberdayaan Perempuan
3. Meningkatkan Kesetaraan Gender

PROGRAM

26 perempuan calon kepala daerah mempunyai program kerja yang menyematkan kata perempuan, wanita, atau ibu meski tak menyematkannya di visi dan misi.

Masih banyak perempuan calon kepala daerah yang tak spesifik merinci program-program kerjanya. Misalnya, tak ada keterangan lebih lanjut mengenai maksud dari peningkatan pemberdayaan perempuan; pemenuhan hak dan perlindungan perempuan; memperluas ruang bagi wanita; dll.

Namun, ada juga program-program kerja yang cukup spesifik seperti menciptakan kemudahan berwirausaha bagi perempuan; menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan; menurunkan angka kematian ibu dan anak; pemberdayaan ibu rumah tangga; pembagian susu gratis bagi ibu dan anak; serta rekrutmen berbasis kesetaraan gender di birokrasi.

PENCOMOTAN ISU PEREMPUAN

Isu perempuan hanya disematkan begitu saja dalam visi, misi, dan program yang diusung dengan mengabaikan substansinya.

Pencomotan perspektif ini akan menjauhkan dari substansi kepentingan perempuan yang semestinya tergambar dalam visi, misi, dan program.

Visi, misi, dan program seharusnya memuat pemahaman yang baik atas persoalan kompleks dari berbagai isu yang dihadapi perempuan.

Sehingga visi, misi, dan program ini dapat benar-benar menjawab kebutuhan serta mampu merespon tantangan yang khas dihadapi perempuan.

PARTAI DAN KOMITMEN GENDER

Hal ini juga menunjukkan ketidakseriusan partai dalam mengusung kepentingan perempuan. Platform dan ideologi partai mengenai kepentingan perempuan tidak tampak dalam pemilihan perempuan sebagai calon kepala daerah.

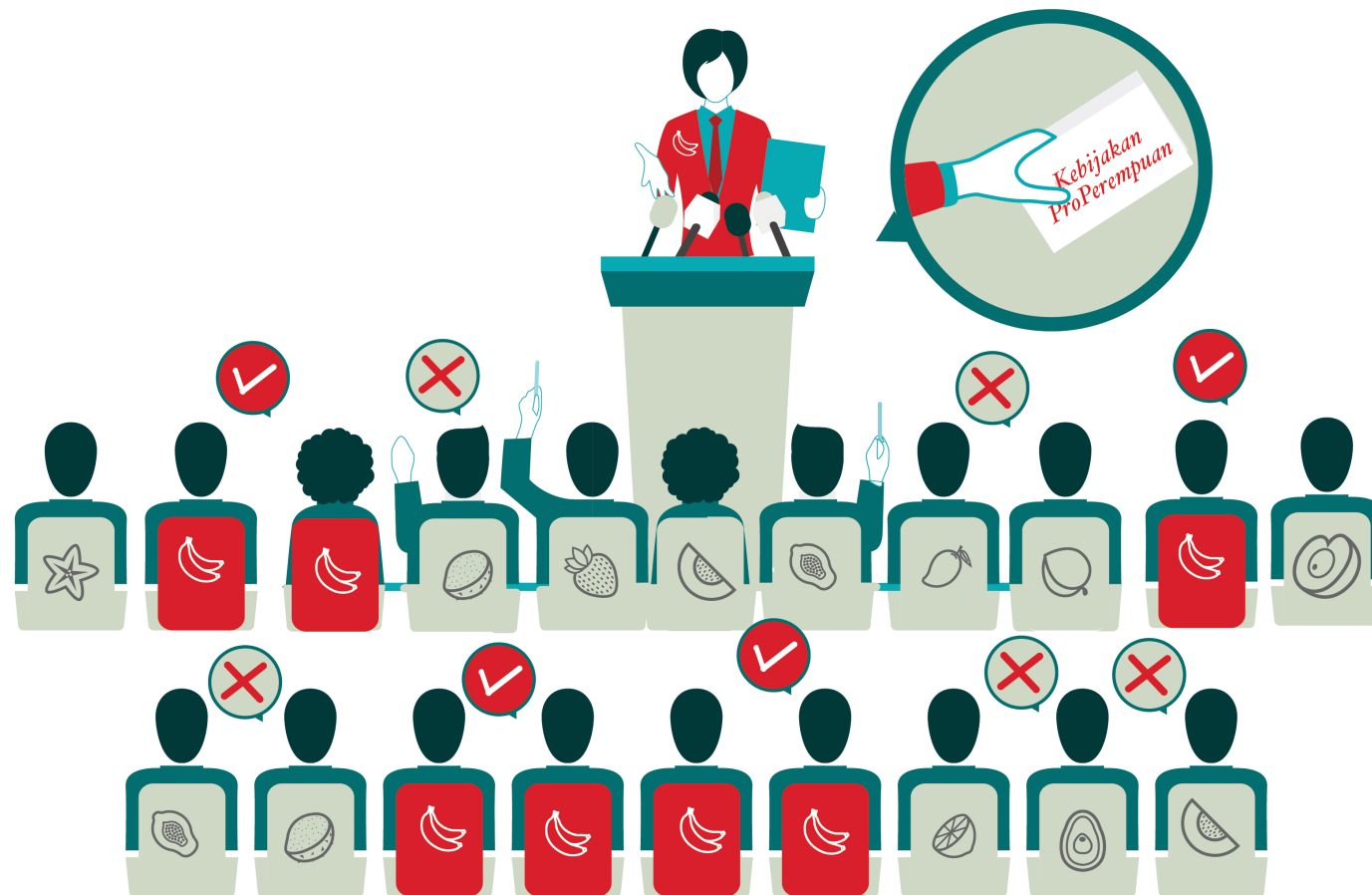
Hal ini makin mengukuhkan sifat pragmatis partai: partai tidak memilih kadernya sebagai calon kepala daerah berdasarkan pertimbangan ideologis memperjuangkan kepentingan perempuan, tapi partai lebih mementingkan pertimbangan popularitas dan elektabilitas calon.

PROSPEK JADI KEBIJAKAN

Keberhasilan perempuan kepala daerah melahirkan kebijakan properempuan tentu dipengaruhi relasi hubungan antara pemerintah daerah—dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah—dengan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Salah satu tantangan pengambilan keputusan dan kebijakan adalah kondisi parlemen dengan tingkat fragmentasi yang tinggi serta bangunan koalisi perempuan calon kepala daerah yang tak mencapai mayoritas.

Parlemen di daerah-daerah tempat perempuan calon kepala daerah tersebut bertarung memiliki nilai **rata-rata ENPP 8** (multipartai ekstrem). Rata-rata perempuan calon kepala daerah bervisi, misi, dan program yang menyematkan kata perempuan, wanita, atau ibu **hanya didukung oleh 30.43** persen kursi di DPRD.



POTENSI KORUPSI

Dalam rentang 2011—2018, 8 kepala daerah ditangkap karena memberikan suap dalam pembahasan APBD kepada 58 anggota legislatif daerah. Pembahasan APBD menjadi kasus dengan total tersangka paling banyak, mencapai 66 orang yang didominasi anggota DPRD.

Kepala daerah mempunyai sekaligus tritunggal sumber daya: kewenangan (desentralisasi politik), diskresi kebijakan (desentralisasi administratif), maupun sumber keuangan (desentralisasi fiskal) (Jaweng, 2014).

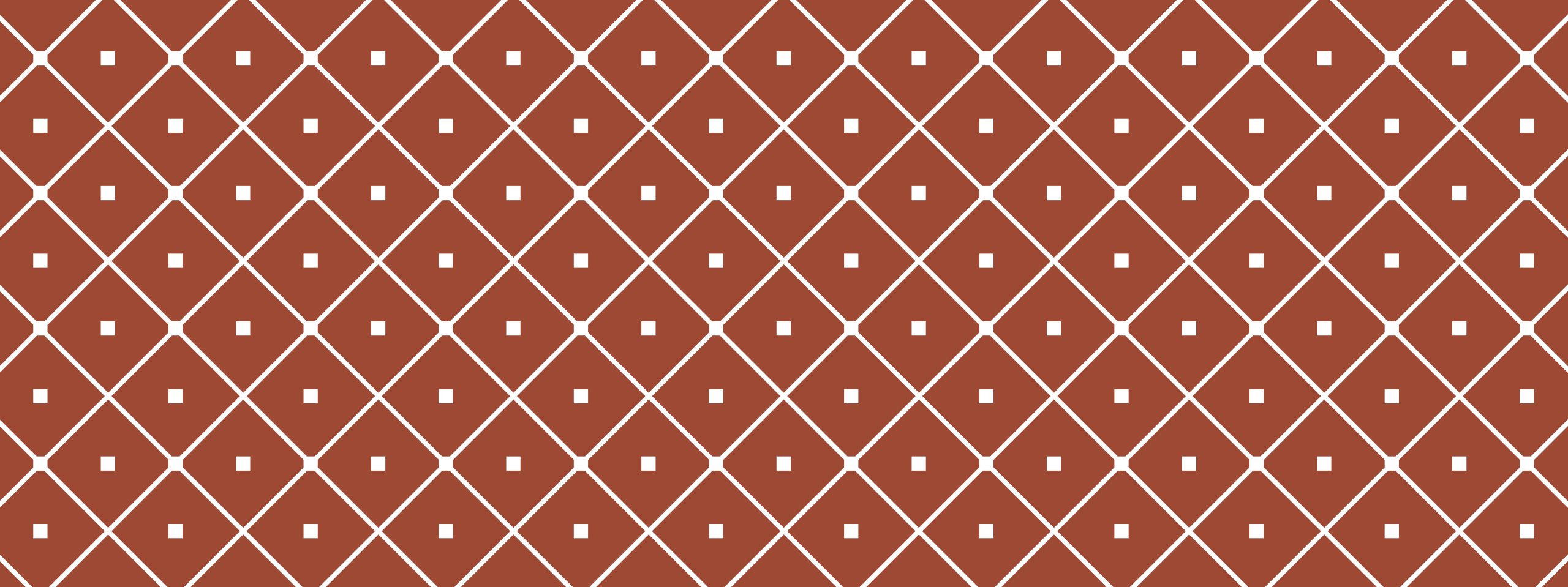
Sementara DPRD tak punya kuasa implementasi anggaran. DPRD hanya diamanatkan untuk membahas dan memberikan persetujuan APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

Keadaan ini lah yang berpotensi berujung pada transaksi dan korupsi.

POTENSI KORUPSI (2)

Berbagai kepentingan partai di DPRD membuat DPRD mencoba mengintervensi kepala daerah dalam menyusun APBD.

DPRD akan berusaha membelokkan anggaran yang harusnya digelontorkan pada kebijakan yang diusung kepala daerah ke kebijakan yang memuat kepentingan DPRD di dalamnya.



TERIMA KASIH